

# PENJATUHAN SANKSI UNI EROPA ATAS TINDAKAN ANEKSASI RUSIA DI KRIMEA, UKRAINA

Ruth Intan Sari  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
E-mail: intansruth8@gmail.com

## Abstract

*This study raises the issue of the legality of the imposition of European Union sanctions for Russia's annexation of Crimea, Ukraine based on international law and the forms of imposing these sanctions. The method used in this research is normative legal research and is prescriptive. The types and sources of research data used are primary legal materials and secondary legal materials collected by using library research legal materials collection techniques. The data analysis technique used is a deductive mindset technique. This research results that the legality of EU sanctions is Council Decision 2014/512/CFSP and Council Regulation (EU) No. 833/2014 with provisions for imposing sanctions based on the European Union Agreement adopted within the framework of the Common Foreign Security and Policy (CFSP). The form of sanctions imposed are; (1) Arms embargo; (2) Export of dual-use goods; (3) Financial sanctions; (4) Prohibition of fulfilling claims; (5) Restrictions on services and other items.*

**Keywords:** Sanctions; European Union; Russia; Annexation.

## A. PENDAHULUAN

Prinsip integritas teritorial negara ditegakkan dengan baik dan dilindungi oleh serangkaian konsekuensial aturan yang melarang campur tangan dalam yuridiksi domestik negara. Prinsip penghormatan terhadap integritas teritorial negara sangat beralasan sebagai salah satu kunci utama sistem internasional, seperti norma yang melarang campur tangan dalam urusan dalam negeri dari negara lain. Misalnya pasal 2(7) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan *the threat or use of force* terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik negara, dan pasal 2(4) Piagam PBB. Prinsip ini secara khusus ditekankan oleh negara-negara dunia ketiga dan juga oleh kawasan lain (Malcolm N. Shaw, 2008: 522).

Intervensi Rusia di Krimea, Ukraina merupakan tindakan ilegal yang dikecam oleh banyak pihak. Intervensi merupakan salah satu bentuk turut campur dalam urusan Negara lain yang bersifat diktatorial. Intervensi Rusia berkaitan dengan penggunaan unit Rusia yang dikerahkan di wilayah Krimea dan di kota Sevastopol, berkaitan dengan kehadiran milisi lokal pro-Rusia dan prajurit Rusia yang beroperasi dengan seragam hijau milisi lokal dengan sebutan *"little green men"*. Kehadiran *"little green men"* di wilayah Ukraina merupakan pelanggaran terhadap pasal 2(4) Piagam PBB dan merupakan tindakan agresi. Partisipasi aktif prajurit Rusia dalam operasi militer yang

bertujuan mengganggu integritas teritorial Ukraina merupakan "invasi oleh angkatan bersenjata suatu Negara di wilayah Negara lain" (Veronika Bilkova, 2015: 35). Pada 3 Maret 2014 pada Debat Majelis Umum PBB, Dewan Uni Eropa mengutuk pelanggaran yang jelas atas kedaulatan Ukraina dan integritas teritorial oleh tindakan agresi Federasi Rusia (UN Doc. S/PV.7124, 1 Maret 2014). Sepuluh hari kemudian, Parlemen Eropa menyatakan bahwa tindakan agresi Rusia dalam menduduki Krimea merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina dan bertentangan dengan hukum internasional. Kemudian, aneksasi Krimea ke Federasi Rusia diformalkan untuk tujuan hukum Rusia dalam Undang-Undang Konstitusi Federal pada tanggal 21 Maret 2014.

Dalam penyelesaian sengketa internasional terdapat penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan (*the use of force*). Salah satu cara penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan yaitu Reprisal. Reprisal adalah upaya permusuhan oleh suatu negara yang dilakukan pada negara lain sebagai bentuk usaha perlawanan agar memaksa negara lain tersebut berhenti menjalankan tindakan ilegalnya. Wujud utama dari reprisal adalah embargo dan boikot. Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional memberikan sanksi kepada Rusia sebagai respon atas aneksasi yang dilakukan Rusia di Krimea. Sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi ekonomi yang merupakan strategi dalam

konflik internasional melalui cara ekonomi guna mencapai tujuan politik. Sanksi dalam konteks Hukum Internasional merupakan hukuman pada negara untuk memaksa mematuhi hukum internasional atau mengubah kebijakan dalam isu tertentu (Moh Rosyidin, 2016:7).

Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada Rusia dalam beberapa fase/tahap. Sanksi yang paling signifikan dijatuhkan oleh UE pada tanggal 31 Juli 2014. UE mengadopsi sanksi yang menargetkan kerjasama sektoral dengan Federasi Rusia tertuang dalam Keputusan Dewan 2014/512/CFSP dan Peraturan Dewan Uni Eropa No.833/2014. Larangan sanksi yang berisi pembatasan akses pada Pasar Modal Uni Eropa untuk Lembaga Keuangan milik Negara Rusia, embargo perdagangan persenjataan, larangan ekspor untuk barang ganda penggunaan akhir militer dan pengguna akhir, pembatasan akses ke teknologi sensitif tertentu terutama di sektor minyak. Sanksi UE memiliki klausul kadaluwarsa atau peninjauan, sehingga sanksi akan terus diperbarui dan diamandemen sebagai tanggapan terhadap perkembangan yang ada. Melalui uraian latar belakang tersebut penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam tentang sanksi melalui penelitian berjudul "Penjatuhan Sanksi Uni Eropa atas Tindakan Aneksasi Rusia di Krimea, Ukraina".

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik pola pikir deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 55-56, 88-89, 181, 237).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas dari penjatuhan sanksi Uni Eropa atas tindakan aneksasi Rusia di Krimea, Ukraina menurut Hukum Internasional

a. Legalitas sanksi Uni Eropa

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata legalitas adalah perihal (keadaan) sah. Arti lainnya dari legalitas adalah keabsahan. Legalitas dalam bahasa Inggris dinamakan *Legality* dalam

*Cambridge Dictionary* diartikan sebagai *the fact that something is allowed by the law* (fakta bahwa sesuatu diperbolehkan oleh hukum). Di dalam *Black's Law Dictionary*, Legalitas memiliki arti yang sama dengan *Legality or Legallness, Lawfulness*.

Sanksi atau Tindakan Pembatasan (*Restrictive Measures*) merupakan salah satu instrumen diplomatik yang bertujuan untuk membawa perubahan pada aktivitas atau kebijakan seperti pelanggaran pada hukum internasional, hak asasi maupun kebijakan yang tidak menghormati aturan dari hukum atau prinsip demokratis. Tindakan pembatasan (sanksi) adalah alat penting dari kebijakan luar negeri dan keamanan umum *the Common Foreign and Security Policy* (CFSP) Uni Eropa, dimana Uni Eropa dapat melakukan intervensi jika diperlukan untuk mencegah konflik atau menanggapi krisis yang muncul saat ini. Sanksi digunakan oleh Uni Eropa sebagai bagian dari pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif melibatkan dialog politik, upaya pelengkap, dan penggunaan instrumen lain yang tersedia. Semua tindakan pembatasan yang diadopsi oleh Uni Eropa sepenuhnya sesuai dengan kewajiban dibawah hukum internasional berkaitan juga dengan hak asasi manusia dan kebebasan dasar (<https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/>, diakses pada 9 November 2020 pukul 14.04 WIB).

Sanksi merupakan tindakan pencegahan yang memungkinkan Uni Eropa sebagai salah satu dari organisasi internasional yang mewakili negara-negara di Eropa untuk menanggapi dengan cepat tantangan dan perkembangan politik yang bertentangan dengan tujuan dan nilai-nilainya. Misalnya, sanksi dapat menargetkan: terorisme, kegiatan proliferasi nuklir, pelanggaran hak asasi manusia, aneksasi wilayah asing, destabilisasi yang disengaja dari negara berdaulat. ([www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/](http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/), diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 13.08 WIB).

Uni Eropa (UE) telah memperoleh peran penting di panggung global dalam dua dekade terakhir dan kebijakan sanksi adalah salah satu elemen yang berkontribusi terhadap hal ini. Langkah-langkah sanksi yang dikenakan harus selalu proporsional dengan tujuannya. Tindakan pembatasan juga harus menghormati kewajiban internasional Komunitas Eropa dan Negara Anggotanya dan Perjanjian WTO. Oleh karena itu, sanksi ekonomi dan keuangan digunakan dengan hati-hati oleh Uni Eropa, sebagai pengecualian terhadap prinsip-prinsip pasar bersama, yang didasarkan pada pergerakan bebas modal dan liberalisasi perdagangan. Klausul penangguhan dalam perjanjian yang ada dengan negara ketiga mungkin harus diterapkan, atau perjanjian tersebut mungkin harus diakhiri, sebelum sanksi dapat diterapkan. Elemen mendasar lain dari tindakan pembatasan atau sanksi UE adalah klausul kedaluwarsa atau peninjauan. Tindakan otonom UE memastikan bahwa sanksi dicabut atau disesuaikan ditinjau sebagai tanggapan terhadap perkembangan (European Commission, 2008: 6).

Kerangka hukum sanksi Uni Eropa memiliki peran penting dalam *the Common Foreign and Security Policy* (CFSP) UE, yang tujuannya ditetapkan dalam Pasal 21 (2) Perjanjian tentang Uni Eropa *the Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU). Secara luas ini termasuk menjaga nilai-nilai Uni Eropa, kepentingan fundamental dan keamanan; mengkonsolidasikan dan mendukung demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum internasional; dan menjaga perdamaian, mencegah konflik dan memperkuat keamanan internasional.

Perjanjian tentang Uni Eropa (Perjanjian Maastricht), berasal dari amandemen Perjanjian Roma 1992 dan didirikan Uni Eropa di atas Komunitas-Komunitas Eropa yang dilengkapi dengan kebijakan dan bentuk kerja sama berdasarkan Perjanjian 1992. Pasal F(2) Title I mencatat bahwa Uni

harus menghormati hak-hak dasar sebagaimana dijamin oleh Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan sebagai hasil dari tradisi konstitusional umum sebagai prinsip umum hukum Komunitas.

Perjanjian Maastricht 1993, negara-negara anggota Uni Eropa memberi hak kepada Dewan Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi atau tindakan pembatasan. UE mendefinisikan secara rinci pemahamannya tentang sanksi dalam tiga dokumen utama "Pedoman penerapan dan evaluasi tindakan pembatasan (sanksi) dalam kerangka Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum UE", "Prinsip Dasar Penggunaan Tindakan Pembatasan (Sanksi)" dan "Praktik Terbaik UE untuk Penerapan Tindakan Pembatasan yang Efektif" (Jana Ilieva, Aleksandar Dashtevski, dan Filip Kokotovic, 2018: 203). Uni Eropa menerapkan sanksi atau langkah-langkah pembatasan dalam mengejar tujuan spesifik dari *Common Foreign Security Policy* (CFSP) dalam Pasal 11 Perjanjian Uni Eropa *Treaty on European Union*. Kerangka hukum untuk menjatuhkan sanksi adalah ketentuan Bab 2, bagian V Perjanjian tentang Uni Eropa *Treaty on European Union* (TEU), serta Pasal 75 dan 215 dari *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU) (Vadim Voinikov, 2015: 68).

Adopsi rezim sanksi Uni Eropa (UE) atau *restrictive measures* melalui paket yang terdiri dari *Council Decision* Keputusan Dewan yang ditujukan pada negara anggota Uni Eropa dan *Council Regulation* Peraturan Dewan, Undang-undang Uni Eropa menciptakan kewajiban pada orang dan entitas di bawah yuridiksi Uni Eropa. Proses adopsi diatur oleh Pasal 30 dan 31 *Treaty on European Union* (TEU).

Sesuai dengan prinsip-prinsip utama yang diuraikan dalam Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pembatasan, sanksi merupakan instrumen preventif dan nonpunitif. Oleh karena itu, tindakan pembatasan tidak dapat menjadi hukuman atas tindakan apapun. Berdasarkan sifatnya, langkah-langkah pembatasan diadopsi untuk membawa

perubahan kebijakan atau kegiatan oleh negara target, bagian dari negara, pemerintah, entitas atau individu. Mengenai kebijakan sanksi terhadap Rusia, langkah-langkah pembatasan diadopsi dengan mengabaikan prinsip ini. Sejak awal kebijakan sanksi terhadap Rusia, terbukti bahwa tindakan pembatasan tidak akan membawa perubahan dalam kebijakan negara tersebut. Oleh karena itu, sanksi diadopsi bukan sebagai tindakan pencegahan, tetapi sebagai hukuman atas tindakan Rusia di Krimea dan Ukraina Tenggara yang dari perspektif UE telah melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yaitu prinsip Non-Intervensi yang melanggar integritas teritorial Ukraina. Kesimpulan ini mengikuti pembukaan dari Council Regulation (EU) No 833/2014 (paragraf 2): "Oleh karena itu, dianggap tepat untuk menerapkan langkah-langkah pembatasan tambahan dengan maksud untuk meningkatkan biaya tindakan Rusia untuk mengurangi integritas teritorial Ukraina, kedaulatan dan kemerdekaan dan untuk mempromosikan penyelesaian krisis secara damai". Pembeneran ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari tindakan restriktif bukanlah membawa perubahan dalam kebijakan Rusia melainkan menghukum negara (Vadim Voinikov, 2015:69).

Keputusan Dewan 2014/512/CFSP tentang tindakan pembatasan mengingat tindakan Rusia menggoyahkan situasi di Ukraina, keputusan ini diadopsi berdasarkan Pasal 29 *Treaty on European Union* (TEU), yang berbunyi sebagai berikut: "*The Council shall adopt decisions which shall define the approach of the Union to a particular matter of a geographical or thematic nature. Member States shall ensure that their national policies conform to the Union positions*". Pasal 29 (TEU) memungkinkan Dewan Uni Eropa untuk mengadopsi sanksi terhadap pemerintah negara ketiga (negara non-UE), entitas non-negara dan individu (seperti teroris) untuk membawa perubahan dalam kebijakan atau aktivitas mereka. Diimplementasikan dalam tatanan hukum Uni Eropa

berdasarkan Peraturan Dewan (UE) 833/2014 didasarkan pada Pasal 215 *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU). Berdasarkan Pasal 215 (TFEU), Dewan dapat mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan keputusan yang diadopsi berdasarkan Pasal 29 TEU untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diterapkan secara seragam disemua negara anggota ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TEXT/HTML/?uri=LEGISSUM:25\\_1&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TEXT/HTML/?uri=LEGISSUM:25_1&from=EN), diakses pada 26 Maret 2021 pukul 16.25 WIB).

b. Tahapan Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia

Pada akhir Desember 2014, Dewan Uni Eropa mengadopsi sekitar 30 tindakan hukum yang memberlakukan tindakan pembatasan (sanksi) terhadap Federasi Rusia. Semua tindakan Dewan yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia secara ringkas dapat dibagi menjadi tindakan dasar dan tindakan tambahan. Tindakan dasar termasuk keputusan dan peraturan yang meluncurkan jenis sanksi tertentu (individu, Krimea dan Sevastopol, dan sanksi ekonomi). Tindakan tambahan adalah keputusan dan peraturan yang digunakan untuk mengubah dan memperbarui tindakan dasar. Semua tindakan lainnya (Keputusan Dewan, Keputusan Pelaksanaan Dewan, Peraturan Dewan, Peraturan Pelaksanaan Dewan) termasuk dalam Tindakan Tambahan.

Tahap pertama sanksi diperkenalkan pada awal Maret 2014 (lihat Tabel 1). Para pemimpin Uni Eropa pertama kali berkoordinasi tindakan mereka dengan mitra internasional dan memutuskan dengan negara G7 lainnya untuk menanggukkan Keanggotaan Rusia di G8. *An extraordinary Foreign Affairs Council* (FAC) pertemuan ini mengusulkan, sesuai dengan keputusan G7, negara anggota UE dengan keanggotaan G8 menanggukkan keikutsertaan mereka dalam aktivitas terkait dengan persiapan KTT Sochi G8 Juni 2014. Penanggukan pembicaraan

bilateral dengan Rusia tentang masalah visa serta tentang Perjanjian baru yang menggantikan yang lama Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama *Partnership and Cooperation Agreement (PCA)*. Pertemuan luar biasa Dewan Eropa menguatkan keputusan FAC dan dikonfirmasi bahwa tindakan yang diantisipasi harus dilaksanakan segera.

Kepala Negara dan Pemerintah juga meminta Komisi Eropa dan *European External Action Service (EEAS)* untuk menyiapkan langkah-langkah tambahan, terutama larangan perjalanan dan pembekuan aset, yang bisa jadi diberlakukan jika situasinya semakin buruk (Viktor Szep, 2019: 4).

**Tabel 1.** Tahap pertama dari sanksi Uni Eropa

Dewan Eropa ( <i>European Council</i> ) dan G7	
- Pengecualian Rusia dari G8 - Penangguhan <i>Partnership and Cooperation Agreement (PCA)</i> baru - Kemungkinan penerapan larangan perjalanan dan pembekuan aset	2 dan 6 Maret 2014
Dewan ( <i>Council</i> )	
- Pengecualian Rusia dari G8 - Penangguhan <i>Partnership and Cooperation Agreement (PCA)</i> baru	3 Maret 2014

Sumber: Viktor Szep 2019

Tahap kedua sanksi diperkenalkan setelah referendum status Krimea (Tabel 2). Menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul kembali di Brussels dan memutuskan sesuai dengan keputusan sebelumnya dari Kepala Negara dan Pemerintah, untuk memberlakukan pembatasan perjalanan dan pembekuan aset terhadap 21 orang yang bertanggung jawab atas tindakan yang merusak atau mengancam integritas teritorial, kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina. Daftar orang dalam pembatasan perjalanan dan pembekuan aset terus

diperluas. Sementara itu, Dewan Eropa meyerukan Komisi Eropa untuk mengusulkan pembatasan ekonomi, perdagangan, dan keuangan mengenai Krimea. Dewan Eropa juga memutuskan untuk membatalkan KKT Uni Eropa-Rusia dan selanjutnya mencatat bahwa negara-negara anggota UE tidak akan mengadakan KTT reguler bilateral. Berdasarkan keputusan itu, *Foreign Affairs Council (FAC)* sepakat bahwa impor barang yang berasal dari Krimea atau Sevastopol ke Uni Eropa harus dilarang (Viktor Szep, 2019: 5).

**Tabel 2.** Tahap kedua dari sanksi Uni Eropa

Dewan Eropa ( <i>European Council</i> )	
- Pembatasan perjalanan <i>travel bans</i> dan pembekuan aset <i>asset freezes</i>	- 6 Maret 2014
- Pembatasan Ekonomi, perdagangan dan keuangan mengenai Krimea	- 20 Maret 2014
Dewan ( <i>Council</i> )	
- 21 <i>travel bans and asset freezes</i>	- 17 Maret 2014
- <i>Import ban and goods originating in Crimea and Sevastopol</i>	- 23 Juni 2014

Sumber: Viktor Szep 2019

Sanksi tahap ketiga diperkenalkan setelah jatuhnya penerbangan MH17 di Juli 2014 (Tabel 3). FAC sepakat untuk mempercepat persiapan lebih lanjut sanksi sesuai dengan pertemuan Dewan Eropa 16 Juli. Menyusul kesimpulan Kepala Negara dan Pemerintahan, Dewan sepakat untuk mengambil

tindakan pembatasan terhadap Rusia di empat sektor ekonomi. Investasi baru di Krimea dan Sevastopol dalam transportasi, telekomunikasi dan energi serta penjualan peralatan dan teknologi untuk eksploitasi minyak, gas, dan mineral juga dilarang (Viktor Szep, 2019:5-6).

**Tabel 3.** Tahap ketiga dari sanksi Uni Eropa

Dewan Eropa ( <i>European Council</i> )	
- Sanksi Ekonomi	- 6 Maret 2014
- Tambahan tindakan pembatasan pada investasi di Krimea dan Sevastopol	- 16 Juli 2014
Dewan ( <i>Council</i> )	
- Pembatasan akses Rusia ke Pasar modal UE - Embargo senjata - Larangan penggunaan barang ganda ekspor <i>dual-use goods export</i> - Larangan penjualan minyak, gas, dan mineral peralatan terkait - Larangan investasi di Krimea dan Sevastopol pada transportasi, telekomunikasi, energi	30 Juli 2014

Sumber: Viktor Szep 2019

Pada tanggal 31 Juli 2014, Uni Eropa mengadopsi Keputusan 2014/512/CFSP dan Peraturan Dewan (UE) 833/2014 berlaku sejak 1 Agustus 2014, menerapkan beberapa langkah: embargo senjata dan material terkait, embargo terhadap barang dan teknologi penggunaan ganda yang ditujukan untuk penggunaan militer atau pengguna akhir militer, larangan impor senjata dan bahan terkait, pengendalian ekspor peralatan untuk industri minyak, dan pembatasan penerbitan dan perdagangan obligasi, ekuitas, atau instrumen keuangan serupa yang jatuh tempo lebih dari 90 hari terhadap orang-orang yang teridentifikasi di sektor keuangan Rusia (Sberbank, VTB Bank, Gazprombank, Vnesheconombank (VEB) dan Rosselkhozbank).

Sanksi ekonomi putaran keempat dan terakhir dijatuhkan pada awal September 2014 untuk mengintensifkan dan memperpanjang sanksi sektoral yang diberlakukan pada bulan Juli.

Pada 8 September 2014, Uni Eropa mengubah Keputusan Dewan 2014/512/CFSP, terutama untuk memperpanjang pembatasan pada penyediaan hutang dan ekuitas: batas jatuh tempo 90 hari untuk provisi yang dibuat pada bulan Juli diturunkan menjadi 30 hari untuk ketentuan yang sama. entitas keuangan, dan pembatasan ini diperluas ke entitas yang diidentifikasi di sektor energi (Rosneft, Transneft, dan Gazprom Neft) dan pertahanan (Opk Oboronprom, United Aircraft Corporation, Uralvagonzavod). Uni Eropa juga melarang ekspor barang, jasa, atau teknologi untuk mendukung eksplorasi atau produksi proyek perairan dalam Rusia, lepas pantai Arktik, atau serpih.

Pada Desember 2020, langkah-langkah pembatasan individu Uni Eropa berlaku untuk 177 individu dan 48 entitas, yang mengalami pembekuan aset dan larangan perjalanan karena tindakan merusak integritas teritorial,

kedaulatan, dan kemerdekaan Ukraina (*Fact sheets on the European Union-2021*. [www.europarl.europa.eu/fachsheets/en](http://www.europarl.europa.eu/fachsheets/en), diakses pada 18 Maret 2021 pukul 11.22 WIB).

2. Bentuk Penjatuhan Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia berdasar pada Keputusan Dewan 2014/512/CFSP dan Peraturan Dewan (UE) 833/2014

Menanggapi keterlibatan Rusia dalam konflik di Ukraina yang dimulai pada awal 2014, Uni Eropa memberlakukan sanksi sektoral pada 31 Juli 2014 terhadap Rusia, termasuk embargo senjata dengan mengadopsi Keputusan Dewan Uni Eropa 2014/512/CFSP dan Peraturan Dewan Uni Eropa No 833/2014 telah berlaku sejak 1 Agustus 2014.

Embargo tersebut awalnya diberlakukan hingga 31 Juli 2015, namun sejak itu diperpanjang secara berkala. Berlaku hingga 31 Juli 2021 dengan amandemen terakhir oleh Keputusan Dewan (CFSP) 2020/2143 tanggal 17 Desember 2020 dan Peraturan Dewan Uni Eropa No 833/2014 berlaku pada hari setelah diterbitkan di Jurnal Resmi Uni Eropa, terakhir diamandemen dengan Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2019/1163 pada 5 Juli 2019 diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2019 dan berlaku pada tanggal 9 Juli 2019.

Keputusan Dewan 2014/512/CFSP menerapkan sanksi ekonomi, termasuk larangan penjualan, pasokan, transfer atau ekspor senjata, barang penggunaan ganda dan teknologi, eksplorasi minyak dan teknologi produksi tertentu, dan bantuan dengan barang dan teknologi yang termasuk dalam daftar umum militer. Peraturan Dewan (UE) 833/2014 melengkapi langkah-langkah ini dengan menetapkan dasar untuk berbagi informasi antara negara-negara UE serta dengan memberi wewenang kepada negara-negara UE untuk memperkenalkan aturan tentang hukuman karena melanggar larangan dan pembatasan. Tindakan Pembatasan Restrictive Measures berdasarkan *EU Sanction Map* secara ringkas yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap Rusia, antara lain : Ekspor Senjata *Arms Export*; Impor senjata *Arms Import*; Ekspor barang penggunaan ganda *Dual use-goods export*;

Target sanksi keuangan *Financial Measures*; Larangan untuk memenuhi klaim *Prohibition to satisfy claim*; Item lainnya *Other Items*; dan Pembatasan layanan.

Keputusan Dewan menekankan bahwa langkah-langkah pembatasan harus direvisi secara teratur mengingat situasi saat ini. Undang-Undang Uni Eropa memberikan kemungkinan untuk menantang sanksi yang diajukan di pengadilan sesuai dengan Pasal 263 *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU), Mahkamah Agung Uni Eropa meninjau legalitas tindakan legislatif dan tindakan Dewan.

#### D. SIMPULAN

1. Legalitas dalam penjatuhan sanksi Uni Eropa atas tindakan aneksasi Rusia berdasarkan oleh *the Common Foreign and Security Policy* (CFSP) Uni Eropa yang tujuannya ditetapkan dalam Pasal 21 (2) *the Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU). Kerangka hukum dalam menjatuhkan sanksi terdapat pada ketentuan Bab 2 bagian V *Treaty on European Union* (TEU), serta Pasal 75 dan Pasal 215 dari *Treaty on Functioning of the European Union* (TFEU). Keputusan Dewan diadopsi berdasarkan Pasal 29 *Treaty on European Union* (TEU), diimplementasikan dalam tatanan hukum Uni Eropa dalam bentuk Peraturan Dewan pada Pasal 215 *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU). Uni Eropa mengeluarkan tindakan dasar yakni Keputusan Dewan 2014/145/CFSP tanggal 17 Maret 2014 dan Peraturan Dewan (UE) No 269/2014 tanggal 17 Maret 2014 menjatuhkan sanksi individu; Keputusan Dewan 2014/386/CFSP tanggal 23 Juni 2014 dan Peraturan Dewan (UE) No 692/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang pembatasan barang yang berasal dari Krimea atau Sevastopol dan investasi apa pun di semenanjung; dan Keputusan Dewan 2014/512/CFSP tanggal 31 Juli 2014 dan Peraturan Dewan (UE) No 833/2014 tanggal 31 Juli 2014 memberlakukan sanksi ekonomi anti-Rusia mengenai tindakan pembatasan di lihat dari tindakan Rusia pada ketidakstabilan situasi di Ukraina.
2. Bentuk penjatuhan sanksi Uni Eropa berdasarkan Keputusan Dewan 2014/512/CFSP dan Peraturan Dewan (UE) No. 833/2014 yang tertera dalam *EU Sanction*

*Map*. Jenis sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa berupa: Larangan/ Embargo Ekspor dan Impor senjata yang tercantum dalam *EU Common Military List*; Ekspor barang

penggunaan ganda; *Financial Measures*; Larangan untuk memenuhi klaim *Prohibition to satisfy claim*; item lainnya dan pembatasan layanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Malcolm N. Shaw. 2008. *International Law*. Cambridge University Press.

Mohamad Rosyidin dan Elpeni Fitrah. 2016. *Sanksi Ekonomi: Tinjauan Politik dan Diplomasi Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Mahmud Marzuki, Peter. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### Jurnal

Jana Ilieva, Aleksandar Dashevski & Filip Kokotovic. 2018. "Economic Sanctions in International Law". *UTMS Journal of Economics* 9 (2): 201–211.

Vadim Voinikov. 2015. "The Eu Vs. Russia: Legal Nature And Implementation Of The Union'S Restrictive Measures". *Baltic region*, № 1 (23) ( 67-74). doi: 10.5922/2079-8555-2015-1-5.

Veronika Bilkova. 2015. "The use of force by the Russian Federation in Crimea". *ZaöRV* 75 (27-50).

Viktor Szep, 2019. "New Intergovernmentalism meets EU sanctions policy: the European Council orchestrates the restrictive measures imposed against Russia". *Journal of European Integration*. Doi: 10.1080/07036337.2019.1688316.

### Konvensi dan Sumber Hukum Internasional

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

UN Doc. S/PV.7124. 1 March 2014. *United Nations Security Council Sixty-ninth year 7124th meeting*.

Keputusan Dewan Uni Eropa (*EU Council Decision*) 2014/512/CFSP

Peraturan Dewan Uni Eropa (*Council Regulation EU*) No. 833/2014

*Treaty on European Union* (TEU)

*Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU)

### Internet

European Commission. External Relation. Restrictive Measures. [https://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/index\\_en.pdf](https://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf), diakses pada 25 Juni 2021 pukul 4.31 WIB.

European Council. Council of the European Union. [www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/](http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/). diakses pada 18 Agustus 2020 pukul 13.08 WIB

European Council. Council of the European Union. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/different-types/>, diakses pada 17 Maret 2021 pukul 9.34 WIB.

EU Sanctions Map. [www.sanctionsmap.eu](http://www.sanctionsmap.eu), diakses pada 2 September 2020 pukul 14.00 WIB.

Fernando Garces de los Fayos. Fact sheets on the European Union 2021. European Parliament. [www.europarl.europa.eu/factsheets/en](http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en), diakses pada 18 Maret 2021 pukul 11.22 WIB.

General Framework for EU Sanctions. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISLUM:25\\_1&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISLUM:25_1&from=EN), diakses pada 26 Maret 2021 pukul 16.25 WIB.